

**ANALISIS PENGAWASAN DAN EFEKTIVITAS
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : ANJANI SUTIKA SARI
NIM : 222016024

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGAWASAN DAN EFEKTIVITAS
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : ANJANI SUTIKA SARI
NIM : 222016024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjani Sutika Sari
NIM : 222016024
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Analisis Pengawasan Dan Efektivitas
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 12 Agustus 2020
Yang menyatakan,



Anjani Sutika Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengawasan Dan Efektivitas
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Anjani Sutika Sari
NIM : 222016024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

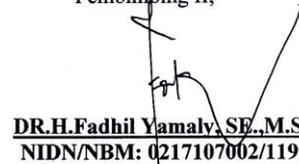
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 09 Agustus 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

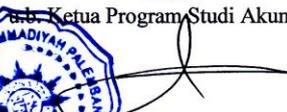
 3/8/2020

Drs. Sunardi, SE., M. Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021


DR.H.Fadhil Yamaly, SE., M.Si., Ak., MM.
NIDN/NBM: 0217107002/1191648

Mengetahui
Dekan
s.d. Ketua Program Studi Akuntansi




Betti, SE., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Q.S Al insyiroh 6-7)*
- *Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup*
- *Kesuksesan bukan di lihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya. jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat lebih baik dari kita.*

*Terucap padaMU Allah SWT.
Kupersembahkan untuk;*

- *Bapak dan ibuku tercinta*
- *Dosen Pembimbing*
- *Dosen - Dosen FEB UMP*
- *Sahabat - Sahabat Terbaikku*
- *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan berjudul “**Analisis Pengawasan dan Efektivitas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan**” yang peneliti dapat selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada orang tuaku Mamaku tercinta Suwaimiwati dan Papaku tercinta Sugito atas do'a dan kasih sayang yang berlimpah, semangat dan selalu memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E., Ak., M.Si dan Bapak DR.H.Fadhil Yamaly, SE.,M.Si.,Ak.,MM sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, dan tak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE,MM selaku Rektor beserta staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan., MM selaku Dekan beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepada keluargaku tersayang terima kasih telah memberikan dorongan semangat dan do'a yang tulus.
7. Sahabatku Nurul Hidayati, S.Ak , Tia Novita Sari, S.Ak dan Verawati, S.Ak yang telah menemani baik suka maupun duka.
8. Teman-teman KKN-ku posko 106 kece dan teman teman seperjuanganku.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 12 Agustus 2020
Peneliti

Anjani Sutika Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengawasan	11
a. Pengertian Pengawasan	11
b. Tahap - Tahap Proses Pengawasan	13
c. Manfaat Pengawasan	13
d. Jenis – Jenis Pengawasan	15
e. Tujuan Pengawasan	16
f. Pengawasan Inspektorat	17
g. Indikator Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja	18

2.	Efektivitas	21
a.	Definisi Efektivitas	21
b.	Kriteria Efektivitas	22
c.	Pengukuran Efektivitas	22
d.	Standar Efektivitas	22
3.	Pertanggungjawaban	23
a.	Definisi Pertanggungjawaban Publik	23
b.	Siklus Pertanggungjawaban Publik	26
c.	Macam - Macam Akuntabilitas Publik	27
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	27
a.	Pengertian APBD.....	27
b.	Fungsi Anggaran	29
c.	Struktur APBD	31
d.	Proses Penyusunan APBD	32
e.	Pelaksanaan APBD	36
B.	Penelitian Sebelumnya.....	42

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	47
B.	Lokasi Penelitian.....	48
C.	Operasionalisasi Variabel	48
D.	Data Yang Diperlukan	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
F.	Analisis Data dan Teknik Analisis.....	51
1.	Analisis Data.....	51
2.	Teknik Analisis Data	52

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	53
1.	Sejarah Singkat Tentang Provinsi Sumatera Selatan	53
2.	Data Laporan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan	57

B. Pembahasan Hasil Penelitian	67
1. Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	67
a. Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah APBD	67
b. Opini BPK Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2019	70
c. Realisasi Belanja Daerah	71
2. Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	73
a. Rumus dan Standar Efektivitas	73
b. Rasio Realisasi Anggaran dan Target Anggaran	75

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	7
Tabel I.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan	7
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	46
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	48
Tabel IV.1	Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016	57
Tabel IV.2	Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017	60
Tabel IV.3	Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018	62
Tabel IV.4	Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019	64
Tabel IV.5	Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD	68
Tabel IV.6	Penetapan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016 - 2019	69
Tabel IV.7	Daftar Opini BPK di Provinsi Sumatera Selatan	71
Tabel IV.8	Tingkat Efektivitas Pengawasan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 - 2019.....	72
Tabel IV.9	Rasio Efektivitas APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 - 2019	76
Tabel IV.10	Persentase Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Penulis

Lampiran 2 : Fotocopy Sertifikat AIK

Lampiran 3 : Fotocopy Sertifikat TOEFL

Lampiran 4 : Fotocopy Surat Keterangan Riset

Lampiran 5 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Fotocopy Bebas Plagiat

ABSTRAK

Anjani Sutika Sari / 222016024 / 2020 / Analisis Pengawasan dan Efektivitas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan untuk mengetahui Pengawasan dan Efektivitas Pertanggungjawaban APBD provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dengan teknik analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan tepat, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian. namun fungsi pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum baik karena terealisasinya anggaran belum sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, Sehingga hal ini perlu adanya koreksi mengenai anggaran dan perencanaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan tidak efektif yang dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2016 sebesar 94%, tahun 2017 sebesar 92%, pada tahun 2018 sebesar 99% dan pada tahun 2019 sebesar 94%.

Kata kunci : Pengawasan, Efektivitas Pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRACT

Anjani Sutika Sari / 222016024/2020 / The Analysis of Supervision and Effectiveness of Accountability of Regional Budget Revenue and Expenditures of South Sumatra

The aim of this study was to determine the Supervision and Effectiveness of the APBD accountability of South Sumatra Province. This research used a descriptive research. The location of the research was conducted at the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency (BPK), of South Sumatra. The data used was secondary data. The technique of collecting the data in this study used document analysis. The methods of data analysis that used in this study were qualitative and quantitative analysis. The technique of analysis data that used was qualitative and quantitative analysis. The result of the study showed that the timeliness of establishing Regional Regulations was carried out correctly, but supervision in the Regional Budget (APBD) was still poor because the realization of the budget was not in accordance with the budget planning so it needed a correction regarding the budget and planning. The Regional Revenue and Expenditure Budget of South Sumatra can be said to be ineffective as seen from the effectiveness ratio in 2016 of 94%, in 2017 was 92%, in 2018 was 99%, and in 2019 was 94%.

Keywords: *supervision, the effectiveness of Accountability, the Regional budget of Revenue and Expenditures*

PENGESAHAN

NO. 229 / Abstract/LB/UMP/ 1x / 20 20

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Perubahan penyelenggaraan pemerintah daerah juga ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem pemerintahan daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi.

Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah, termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangannya yang

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD.

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahap perencanaan pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah rencana anggaran tersebut disahkan menjadi APBD, pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengelolaan dari APBD tersebut. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD). DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut diatas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan

dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD.

Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan Undang-Undang, Peraturan, Keputusan, Kebijakan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor penghambat pembangunan di daerah.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan unit moneter. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen bagi kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu perencanaan dibidang keuangan daerah yang akan menentukan besarnya

jumlah pengeluaran (*out-put*) maupun penerimaan (*in-put*) daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu anggaran, seperti pembangunan, infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kegiatan-kegiatan lainya yang mendukung laju Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun yang akan menjadi persoalan apakah pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sehingga tercapainya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seimbang dengan pengeluaran daerah dalam hal dana digunakan dijalur yang tepat untuk keperluan- keperluan daerah, infrastruktur, pembangunan daerah, dan lain-lainya.

Organisasi anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) bahwa daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Sejak diberlakukanya kedua undang-undang tersebut, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk

pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien.

Efektifitas itu sendiri merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya belanja boleh melebihi apa yang telah dianggarkannya tetapi efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Efektivitas di artikan sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan- tujuan yang telah di tentukan. Jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah di tentukan maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Pemerintah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan kinerja. Dalam peran kepemimpinan, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pengakuan dan pengambil ahlian tanggungjawab atas tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan yang mencakup administrasi, implementasi, dan penguasaan dalam ruang lingkup peran atau posisi ketenagakerjaan, serta mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan konsekuensi apa yang telah dihasilkan.

Pemerintah memiliki berbagai anggaran diantaranya adalah anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan adalah suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara. Sedangkan anggaran belanja adalah suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu tahun. Belanja daerah berdasarkan jenisnya terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga .

Berikut informasi mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi pendapatan Daerah provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
2016	6.999.258.016.791,91	6.582.780.929.676,33	94%
2017	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,96	92%
2018	9.196.477.924.456,14	9.141.371.395.099,97	99%
2019	9.783.467.604.746,55	9.215.916.111.901,73	94%

Sumber : www.bpk.go.id

Berdasarkan tabel I.1 disimpulkan bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah selama tahun anggaran 2016-2019 mengalami fluktuasi. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2016 sebesar 94%, tahun 2017 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 92%. Pada tahun anggaran 2018 realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 99% dan pada tahun anggaran 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 94%. Pendapatan Daerah mengalami penurunan atau kenaikan tergantung seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya.

Tabel I.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
2016	4.496.474.573.009,91	4.094.471.321.477,03	91%
2017	6.439.523.470.869,00	5.788.552.526.667,59	90%
2018	7.426.770.057.057,95	6.763.760.533.371,09	91%
2019	7.074.829.339.229,22	6.418.398.930.897,59	91%

Sumber : www.bpk.go.id

Berdasarkan tabel I.2 disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan dan mengalami penurunan. Naik turunnya Anggaran Belanja daerah ini karena

realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, penyebabnya pada fungsi pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana semestinya dengan teori.

Fenomena masalah yang terjadi saat ini adalah realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami naik turun atau fluktuatif. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki perbedaan yang jauh dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengelolaan keuangan belum optimal karena penerimaan anggaran cenderung meningkat sesuai dengan sumber keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan, pemahaman tentang undang-undang dan peraturan yang masih lemah. Aktivitas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan adanya pemborosan keuangan, dan tingginya harga pada penyusunan keuangan sehingga mengakibatkan kelalaian dalam pertanggungjawaban penganggaran program.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Basariyah (2017). Hasil penelitian tingkat dan kriteria efektivitas untuk pelaksanaan anggaran pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana dengan efektif. Rasio efisiensi yang dihasilkan selama lima tahun menunjukkan hasil yang bervariasi.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Andi Aminah (2019) hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep seperti pengawasan terhadap penyusunan APBD,

pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap perubahan APBD dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban APBD sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengawasan dan Efektivitas Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan dan efektivitas pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian adalah untuk mengetahui Pengawasan Dan Efektivitas pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas, maka penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai tentang pentingnya mengetahui pengawasan dan efektifitas pertanggungjawaban APBD.

2. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengembangan pemerintah kabupaten/kota agar dapat melakukan pengawasan dengan baik terhadap APBD agar dapat lebih efektif dalam pertanggungjawabannya.

3. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Adelstin Tamasoleng. 2015. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Aminudin. 2015. *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. E-Jurnal Katalogis. ISSN : 2302-2019. Volume 3 Nomor 12, Desember 2015. Halaman 132-141.
- Andi Aminah. 2019. *Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep*. Meraja Journal. Volume 2 Nomor 2, Juni 2019.
- Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. 2019. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Penerbit MEDIATERA. Kebumen.
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit : UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulida Rahmawati. 2009. *Akuntansi pemerintahan*. penerbit Selemba Empat. Jakarta.
- Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Tahun 2018.
- Fia Laksono. 2017. *Dimensi Manajerial dan Politik Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Ketepatan Waktu Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitar Tahun Anggaran 2013-2015)*. Jurnal JIAP. ISSN : 2302-2698. Vol. 3 No. 1 PP 37-44 2017.
- Harry P. Paat, Grace B. Nangoi, Rudy J. Pusung. 2019. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Emba. Vol. 7 No. 3 Juli 2019, Hal. 2979-2988.
- Heru Wicaksono. 2019. *Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekoah (BOS) Di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Suatu pengantar. Edisi ketiga. Penerbit Erlangga.
- Inu Kencana Syarif. 2019. *Ilmu Manajemen*. Penerbit Reka Cipta. Bandung-Jawa Barat
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor publik*. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Melania Rampengan, Grace B.Nangoi, dan Hendrik Manossoh. 2016. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No.03.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Keuangan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Nurlan Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Penerbit Indeks.
- Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Siti Basariyah. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. E-Jurnal Katalogis. ISSN : 2302-2019. Volume 5 Nomor 6, Juni 2017. Halaman 63-74.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit : CV. Mandar Maju. Bandung.
- V Wiratna Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.